

STRATEGI *MEDIA RELATION* HUMAS KABUPATEN MALANG DALAM SITUASI KRISIS (Studi Kasus Penangkapan Bupati Malang Rendra Kresna Tahun 2018)

¹ Nikmatus Sholikhah*, ¹ Muhammad Adil Amrullah

¹ Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya Malang

*Corresponding author: nicmah21@gmail.com

ABSTRAK

Media *partnership* atau menjalin mitra dengan media memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan sebuah organisasi, terlebih saat organisasi mengalami masa-masa krisis. Media massa menjadi penjaga gawang (*gatekeepers*) dan mengontrol informasi yang mengalir ke masyarakat dalam suatu sistem sosial. Ini artinya hubungan yang baik antara pihak humas/ *public relations* dan media sangatlah di perlukan, sehingga seorang humas dituntut untuk memiliki relasi yang baik dengan media. Dalam jurnal ini penulis akan mengulas bagaimana strategi media *relations* pemerintah kabupaten Malang dalam menghadapi krisis, hasil analisis dari studi kasus penangkapan Rendra Kresna selaku Bupati Kabupaten Malang 2016-2021 melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018 lalu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menganggap aktivitas media *partnership* dalam menjaga keberlangsungan organisasi di masa krisis. Untuk memperoleh gambaran bagaimana strategi *media relations* yang dilakukan oleh Humas Pemkab Malang dalam situasi krisis, khususnya saat peristiwa menangkap Bupati Rendra Kresna. Kemudian metode pengumpulan data dengan wawancara semistruktur.

Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui, pihak Pemkab Malang memiliki beberapa aktivitas media *relations* yang dilakukan ketika menghadapi krisis, dengan cara : 1) **penerapan sistem terbuka terhadap media ketika memasuki masa krisis**, 2) **penerapan strategi defensif dan adaptif yang diterapkan pada media relations**, 3) **menjalin hubungan baik dengan media, namun menempatkan posisi media berada di tengah (moderat)**. Kesimpulan strategi *media relations* yang dilakukan oleh pihak Pemkab Malang yaitu menjalin hubungan baik terhadap media dengan cara berkomunikasi baik dengan wartawan secara personal, dan wajar, serta mempermudah akses informasi kepada para wartawan untuk mengurangi adanya misinformasi dan disinformasi.

Keyword : *Public Realtion, Krisis, Media Relations*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, aktivitas media *relations* menempati posisi yang penting dalam pekerjaan seorang *Public Relations* (PR) atau Humas karena media massa menjadi penjaga gawang (*gatekeepers*) dan mengontrol informasi yang mengalir ke masyarakat dalam suatu sistem sosial (Darmastuti, 2020). Yosol Iriantara mengartikan media *relations* merupakan bagian dari PR eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi (Saputra & Nasrullah, 2014).

Dalam instansi pemerintahan, divisi humas tentunya menjadi divisi yang cukup penting. Unit Humas disebuah instansi milik pemerintah merupakan sebuah keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktifitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat dalam, maupun kepada masyarakat luar (Ruslan, 2005). Salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder eksternal adalah dengan melakukan aktivitas media *relations* dalam berbagai situasi, termasuk dalam situasi krisis.

Krisis merupakan suatu masa kritis yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang memiliki kemungkinan pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan organisasi. Definisi lain krisis juga diutarakan oleh Devlin dalam bukunya *Crisis Management Planning & Execution* (Kriyantono, 2015), yang mendefinisikan krisis sebagai masa yang tidak stabil yang dialami organisasi dengan kemungkinan jelas pada hasil yang tidak diinginkan. Situasi krisis juga pernah di alami oleh Pemerintah Kabupaten Malang saat bupatinya yaitu Rendra Kresna ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2018.

Pada hari Kamis 11 Oktober 2018, KPK menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna (RK) sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus pertama adalah dugaan menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sebesar Rp 3,45 miliar. Kasus kedua adalah dugaan menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar bersama seseorang bernama Eryk Armando Talla (EAT) (Hangga, 2018).

Dalam situasi tersebut, tentunya Humas Pemkab Malang memiliki peran dalam menanggapi rentetan pertanyaan dari pihak media terkait kasus penangkapan Bupati Malang Rendra Kresna. Berbagai media mulai dari media cetak, on-line hingga tv akan mencari informasi terkait kasus yang mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Malang. Hal tersebut akan berlangsung cukup panjang mengingat masih banyak proses persidangan hingga penetapan hukum bagi Bupati Malang. Sehingga dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana strategi media *relations* Humas Kabupaten Malang dalam menghadapi situasi krisis, khususnya dalam kasus penangkapan bupati Malang, Rendra Kresna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, naras-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi (Kriyantono, 2006). Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana strategi *media relations* yang dilakukan oleh Humas Pemkab Malang dalam situasi krisis, khususnya saat peristiwa menangkap Bupati Rendra Kresna 2018 lalu.

Kemudian metode pengumpulan data dengan wawancara semistruktur. Dalam Teknik wawancara ini, pewawancara biasanya memiliki draf pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan (Kriyantono, 2006). Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan *authenticity*, yaitu memperluas konstruksi personal yang dia ungkapkan. Misalnya periset memberikan peluang subjek untuk bercerita panjang lebar tentang apa yang dialami dalam konteks wawancara yang informal dan santai

PEMBAHASAN

1. Krisis Manajemen

Dalam sebuah organisasi, lembaga maupun instansi tentunya kita juga akan menghadapi masa sebuah masalah, bahkan menuju ke fase krisis. Humas Pemerintah Kabupaten Malang sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan pimpinan, latar belakang kebijakan yang diambil dan tujuan yang diharapkan. Humas pemerintah harus memiliki strategi yang baik untuk menangani permasalahan yang dihadapi sekaligus mendapatkan citra yang baik oleh pemerintah itu sendiri (Lenci & Rakhim, 2018) .

Dengan adanya peristiwa penangkapan Bupati Malang, Bapak H. Rendra Kresna terkait kasus korupsi dan akhirnya Bupati ditangkap oleh KPK pada Oktober 2018 berdampak pada kestabilan Pemerintah Kabupaten Malang. Publik dan media, khususnya rakyat di Kabupaten Malang dan sekitar menyoroti kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, lembaga Pemerintah Kabupaten memasuki masa krisis.

Menurut Kriyantono (2015) krisis merupakan suatu masa kritis yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang memiliki kemungkinan pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan organisasi. Krisis dapat menimbulkan kepanikan yang dapat dirasakan oleh organisasi dan publik. Dalam kasus penangkapan Bupati Malang Rendra Kresna sontak membuat Pemkab Malang panik. Krisis ini disebabkan oleh faktor manusia dan termasuk jenis krisis manajemen.

Krisis manajemen adalah krisis yang terjadi saat manajemen tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara akuntabel. Kesalahan manajemen seperti tidak mampu mengatasi konflik dengan karyawan, kekosongan kekuasaan, terlibat kasus hukum, yang menyebabkan organisasi tidak dapat berjalan dengan stabil (Kriyantono, 2015). Sehingga krisis yang terjadi oleh Pemkab Malang adalah krisis manajemen akibat Bupati yang merupakan pimpinan di Pemkab Malang terlibat kasus hukum.

Dalam kasus tersebut, Bupati Malang periode 2016-2021 Rendra Kresna pada Kamis 11 Oktober 2018 ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus pertama adalah dugaan menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan seseorang dari pihak swasta bernama Ali Murtopo (AM) sebagai pemberi suap. Kasus kedua adalah dugaan menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar bersama seseorang bernama Eryk Armando Talla (Hangga, 2018).

Kemudian kasusnya, Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna akhirnya divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Rendra menjadi terdakwa karena terlibat kasus suap Rp 7,5 miliar, divonis enam tahun penjara. Serta denda Rp 500 juta subsidi enam bulan penjara. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 4,075 miliar (Suparno, 2019).

2. Penerapan Sistem Terbuka Terhadap Media Ketika Memasuki Masa Krisis

Kasus Tindakan korupsi yang menyeret nama Bupati Malang Rendra Kresna menjadi sebuah hal yang tidak terduga membuat jajaran Pemkab Malang panik. Dalam kasus tersebut, Humas Pemkab Malang juga melakukan serangkaian tindakan untuk menghadapi rentetan pertanyaan dan opini publik terhadap instansi.



Gambar 1: Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekda Kabupaten Malang

Dalam struktur organisasinya, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki Sembilan pegawai negeri sipil, 25 tenaga kontrak dan 34 personil. Humas dan Protokol dipimpin oleh satu Pembina dan tiga Kepala Sub Bagian yaitu Bagian Protokol, Bagian Pengumpulan, Bagian Pengelolaan Informasi dan Bagian Publikasi & Dokumentasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi, Johan Dwijo Saputro, S.Sos dalam dua sesi. Sesi pertama pada tanggal 3 Maret 2020 di Kantor Kabupaten Malang dan pada tanggal 9 April 2020 dengan telepon seluler untuk memperdalam data. Menurut Johan, saat terjadi informasi pengeledahan kediaman Bupati hingga Bupati ditangkap oleh KPK, banyak media yang menghubungi.

“Sebenarnya sumber pemberitaan awal itu muncul, lalu mereka para wartawan mencari sumber primer, dan mereka juga konfirmasi kepada kami melalui Humas Pemkab Malang, bahkan ada yang langsung konfirmasi kepada bapak bupati, dan kita harus menjawab sesuai faktanya.”

Dalam kasus tersebut, Humas Pemkab Malang juga mengetahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh seorang Humas atau *Public Relations* (PR) sangat berpengaruh dalam suatu sistem saling terhubung dan saling pengaruh. Menurut teori sistem, PR memiliki kemampuan mempengaruhi berfungsinya keseluruhan sistem organisasi (Laborde, 2005) sehingga Humas sangat berhati-hati dalam memberi keterangan kepada publik dan media.

Peran manajerial dilakukan oleh Humas Pemkab Malang yaitu berkaitan dengan aktivitas yang membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah (Kriyantono, 2014). Menurut Humas Pemkab Malang Johan Dwijo, pihaknya melakukan identifikasi persoalan atau permasalahan terlebih dahulu sebelum bertindak melakukan penanganan.

“Kita lihat dulu persoalannya apa yang terjadi. Karena setiap masalah penanganannya beda. Ada yang harus di tanggapi ada yg tidak dan ada yg di alihkan isunya. Kita harus memahami bahwa pemerintah adalah satu-satunya instansi yang selalu di pandang negatif dan selalu salah.”

Kemudian setelah melakukan identifikasi, dalam kasus hukum yang dialami oleh Bupati Malang periode 2016-2021 yaitu Rendra Kresna merupakan kesalahan pribadi bukan kesalahan instansi pemerintah. Namun Humas juga melakukan komunikasi dengan Bupati terkait respon apa yang akan

mereka sampaikan kepada publik melalui media. Menurut Johan, Kabag Publikasi dan Dokumentasi, saat kasus tersebut terjadi ia menerapkan sistem organisasi terbuka yaitu membuka komunikasi dengan publik melalui media.

“Pasa masa awal kasus muncul, kita diam dulu. Bahkan saya ijin dengan Bapak Bupati untuk mendingkan terlebih dahulu sebelum memberi respon. Setelah melakukan identifikasi, kami baru merespon dengan kejujuran, bahwa Bupati telah terjerat kasus hukum dan kami menyerahkan semua urusan hukum kepada pihak berwajib. Kami sampaikan normatif.

Kita harus jujur. Jujur apa yang terjadi kita sampaikan dengan baik dan dengan cara yang benar. Sesuatu yang salah di bicarakan dengan baik, maka akan menjadi baik, akuilah. Jangan dengan kebohongan yang lain. Kita sampaikan dengan cara-cara yang baik.

Dalam kasus ini, pihak Humas secara sigap melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Rendra Kresna yang terjerat hukum. Bagian Humas dan Protokol Pemkab Malang memiliki tugas pokok fokus pada Bupati atau disebut sebagai Juru Bicara Bupati, sedangkan untuk pelayanan lembaga secara umum di kelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Sehingga Humas memiliki *power* untuk mengambil keputusan terkait kasus yang dialami oleh Pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Malang sehingga Humas Pemkab Malang bisa menjalankan fungsi *boundary-spanning* sebagai aktivitas penjaga gerbang (*gatekeeper*).

Dalam kasus ini, aktivitas *boundary spanning* terlihat dengan Humas Pemkab Malang membuka informasi kepada publik melalui media. Humas menjelaskan informasi tentang kasus yang melanda Bupati secara normatif, tidak dilebih-lebihkan dan jujur menyampaikan fakta hal tersebut demi menjaga kestabilan dan menjaga nama baik atau citra instansi pemerintah. Kemudian setelah memberi pernyataan yang cukup, humas memilih untuk mendingkan dan tidak terlalu berbicara banyak dengan media.

3. Penerapan Strategi Defensif dan Adaptif dalam Media Relations

Media relations atau hubungan media menurut Frank Jefkins adalah usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan (Nurudin, 2008, hal.12). *Media relations* adalah salah satu aktivitas PR yang harus dijalankan dalam berbagai situasi.

Sejatinya *media relations* bertujuan untuk membangun hubungan baik antara organisasi, lembaga atau institusi dengan media. Namun ternyata dalam situasi krisis, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh humas untuk meredam bahkan mengatasi krisis. Dalam kasus hukum Bupati Malang Rendra pada Oktober 2018 lalu, Humas Pemkab Malang menerapkan strategi defensif dan adaptif.

Strategi lanjutan setelah identifikasi persoalan, dalam kasus OTT tersebut pihaknya menggunakan strategi *defensive* yaitu mengambil Langkah-langkah mengulur waktu, dan memberi benteng yang kuat sebelum memberikan pernyataan. Hal tersebut terlihat dalam kutipan wawancara berikut:

“Saat pak Rendra terkena kasus, semua media mempublikasikan, kita diam saja. Menjadi hal yang percuma jika kita langsung memberi pernyataan ke media dan ke dinas-dinas tentang hal-hal yang positif. Berapapun anggarannya tak akan merubah fakta, dan percuma. Kami pun meminta ijin kepada pak Rendra untuk membiarkan dulu publikasi media sesuai dengan kasus hukum yang masih berjalan”.

Kemudian setelah melakukan identifikasi masalah, pihak Humas Pemkab Malang mulai melakukan strategi adaptif dengan media. Yaitu melakukan kompromi dengan memberikan keterangan sejujurnya dengan media.

Setelah melakukan identifikasi, kami baru merespon dengan kejujuran, bahwa Bupati telah terjerat kasus hukum dan kami menyerahkan semua urusan hukum kepada pihak berwajib. Kami sampaikan normatif.

Jika kita sangkal hal itu malah akan menjadi boomerang kepada Pemkab Malang sendiri. Namun terkadang ada pula birokrasi ada yang berkomunikasi yang kurang baik, menutupi karena takut dengan media, itu sikap yang tidak benar.”

Kemudian humas juga melakukan Tindakan adaptif dengan meluruskan citra. Menurutnya, kasus hukum yang menjerat Bupati Malang dua periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, Rendra Kresna merupakan masalah personal bukan instansi.

4. Menjalin Hubungan Baik dengan Media, Namun Menempatkan Posisi Moderat (Ditengah).

Sejatinya pers memiliki peranan yang besar dalam kehidupan sebuah lembaga, terlebih bagi lembaga yang selalu haus akan pengakuan masyarakat. Bagi lembaga pemerintahan pun, untuk meningkatkan citra positif membutuhkan pula peranan media massa ini. Sebab sebuah keberhasilan tanpa diketahui masyarakat merupakan suatu kegiatan yang sia-sia (Abdullah, 2004). Namun ada beberapa perlakuan yang dilakukan Humas Pemkab Malang dalam menjalin relasi dengan media.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Humas Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi, Johan Dwijo Saputro menuturkan, menjalin hubungan baik dengan media memang penting bagi kelancaran penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah. Namun ada batasan-batasan tertentu karena disisi lain, media juga punya kewajiban untuk menyampaikan fakta entah itu hal yang baik maupun yang kurang baik.

Salah satu cara menjalin hubungan baik adalah dengan selalu menyediakan informasi dan berita berupa *press release*, foto, berita dan video tentang kegiatan Bupati Malang kepada wartawan melalui website dan watshap grup khusus wartawan yang dimiliki oleh Humas Pemkab Malang dan penganggungjawab grup watshhap adalah bapak Johan. *Press release* sengaja diberi dengan format tulisan yang cukup panjang sehingga memudahkan wartawan mengutip dengan mengambil banyak *angle*.

Kemudian narasumber juga menjelaskan bahwa, melakukan pendekatan personal juga dibutuhkan seperti mengadakan pertemuan diluar acara formal dan menanyakan kabar juga dilakukan. Hal tersebut untuk membangun kedekatan antara Humas dengan para rekan pers, sehingga jika ada informasi yang kurang baik tentang Pemkab Malang, pihak media tidak langsung liar dalam membuat berita. Mereka akan mudah bertanya langsung dan konfirmasi dengan Humas Pemkab Malang.

Kemudian terkait posisi Humas dengan media menurut narasumber, pihaknya memilih menempatkan diri pada posisi moderat atau ditengah. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Memang menjalin kemitraan dengan pihak media itu bukanlah suatu hal yang pasti, ketika kita baik mereka juga otomatis baik, terkadang apa yang terjadi tidak seperti itu karena prinsip utama dari media itu adalah mencari sesuatu yang laku untuk di beritakan. Sehingga tidak bisa dijamin ketika kita sudah menjalin kemitraan yang baik dengan media maka serta merta yang akan di blow up oleh media tentang kita adalah hal-hal yang baik saja. Karena hal tersebut, kami (pemkab Malang) mengambil porsi moderat (ditengah-tengah), tidak terlalu yang berlebihan.”

Dalam kasus OTT Bupati Malang, Rendra Kresna seluruh media baik TV, radio, cetak dan media on-line mencari kejelasan kasus tersebut. Sehingga saat Humas Pemkab Malang melakukan strategi adaptif dengan menjelaskan duduk permasalahan secara jujur, formal dan terbuka pada media yang biasa menjadi rekanan Pemkab Malang. Karena mereka sebelumnya melakukan hubungan baik, nyatanya semua media juga memberitakan berita negative tersebut namun tak berlebihan, sesuai porsi. Karena pihak Pemkab menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan kesalahan pribadi Bupati, bukan

menarik instansi. Tindakan media yang memberitakan secara tak berlebihan dan fokus pada pemberitaan person Bupati Rendra Kresna, bukan instansi membuat berita tersebut tak menjadi isu yang berkepanjangan dikalangan masyarakat Malang Raya.

Kemudian Humas Pemkab Malang juga melakukan aktivitas *controlling* media. Dalam struktur Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malang, terdapat Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan informasi. Semua berita tentang Pemkab Media yang muncul di media dipantau. Jika ada berita kurang baik tentang wilayah Pemkab Malang, Humas juga bisa mengalihkan denan berita lain yang positif.

KESIMPULAN

Aktivitas *media relations* menempati posisi yang penting dalam pekerjaan seorang public relations atau humas karena media massa menjadi penjaga gawang (*gatekeepers*) dan mengontrol informasi yang mengalir ke masyarakat dalam suatu sistem sosial. Ini artinya hubungan yang baik antara pihak humas dan media sangatlah di perlukan.

Keberadaan devisi kehumasan di lingkungan Pemkab Malang memberikan kontribusi positif dalam pembentukan opini masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan selama ini. Melalui media massa, arah dan kebijakan pemerintah dapat tersalurkan dengan baik karena memiliki fungsi yang strategis dalam menyampaikan informasi.

Dari pembahasan di atas, ketika instansi pemerinta kabupaten Malang didera krisis dengan adanya bupatinya yaitu Rendra Kresna ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2018, Humas Pemkab bergerak cukup hati-hati. Menurut Humas Pemkab Malang Johan Dwijo, pihaknya melakukan idektifikasi persoalan atau permasalahan terlebih dahulu sebelum bertindak melakukan penanganan. Strategi lanjutan dimulai dengan strategi *defensive* yaitu mengambil Langkah-langkah mengulur waktu, dan memberi benteng yang kuat sebelum memberikan pernyataan. Kemudian setelah melakukan identifikasi masalah, pihak Humas Pemkab Malang mulai melakukan strategi adaptif dengan media, yaitu melakukan kompromi dengan memberikan keterangan sejujurnya dengan media. Humas juga telah menjalankan hubungan baik dengan media, sehingga media pun tak terlalu memberitakan kasus tersebut secara berlebihan. Hal tersebut membuat masyarakat tak membicarakan krisis tersebut dalam jangka waktu lama, setelah Bupati pengganti dipilih yaitu M.Sanusi.

Humas Pemkab Malang telah melakukan kegiatan *media relations* dengan cukup baik. Dalam menjalankan fungsinya, devisi kehumasan pemerintah kabupaten Malang *aware* tentang pentingnya hubungan baik dengan media. Mereka melakukan berbagai hal agar keharmonisan hubungan dengan media dapat terjaga, yakni dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak media, tetapi tetap dalam batas wajar tidak terlalu memberikan *treathment* yang berlebihan. Menghargai para wartawan, kejujuran menjadi hal yang utama, serta yang terpenting adalah jika melakukan kesalahan, harus berani mengakuinya. Namun yang perlu dikritisi, pihak Humas Pemkab Malang tak memiliki tim manajemen krisis dan protokol manajemen krisis sehingga pihaknya hanya menggunakan pengalaman dalam mengatasi krisis. Diharapkan Pemkab Malang bisa merancang manajemen krisis sehingga bisa menjadi *guidens* saat melakukan tindakan penanganan krisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmastuti, R. (2012). *Media Relations – Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Hangga, M. (2018, Oktober 12). 6 Fakta Dugaan Korupsi Bupati Malang, Siap Ditahan hingga Barang Bukti Uang Dollar. Kompas.com. Sumber.
<https://regional.kompas.com/read/2018/10/12/15493521/6-fakta-dugaan-korupsi-bupati-malang-siap-ditahan-hingga-barang-bukti-uang?page=1>
- Kriyantono, Rachmat. (2015). *Public Relations, Issue & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kriyantono, R. (2014). *Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Lenci, S.,S & Rakhim, A. (2018). Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Malang Dalam menjalin Hubungan Dengan Majalah Kanjuruhan Untuk Menyebarkan Informasi Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Linggar, M., A. (2002). *Teori dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara, hl. 84-86.
- Lettimore, dkk. (2010). *Public Relation Profesi dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nurudin. (2008). *Hubungan Media: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rini Darmastuti,R. (2013). *Media Relations: Konsep, Strategi, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, (47-48).
- Ruslan, Rosady. (2005). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosady. (2007). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saputra,W & Nasrulla, R. (2014). *Public Relations 2.0: Teori dan Praktik Public Relations di Era Cyber*. Depok: Gramata Publishing, hl.130.
- Suparno. (2019, Mei 9). Bupati Malang Nonaktif Rendra Kresna Divonis 6 Tahun Penjara. Detik.com. Sumber dari :<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4542892/bupati-malang-nonaktif-rendra-kresna-divonis-6-tahun-penjara>.